

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

(Studi Kasus tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
di PT Primissima Kabupaten Sleman)

Erni Hasana Putri, Febriyanti Angelia Ginting

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Korespondensi penulis: ernihasana179@gmail.com, febriyanti.sungam@gmail.com

Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang sangat penting bagi proyek yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi sehingga dibutuhkan adanya penerapan Sistem Manajemen K3 agar terhindar dari kecelakaan kerja pada suatu tempat kerja atau proses produksi. Kegiatan produksi di PT Primissima juga tak luput dari adanya kecelakaan kerja yang terjadi di setiap tahunnya, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan mengurangi kecelakaan kerja melalui penelitian pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara baik dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan responden dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi pada lokasi penelitian yaitu di PT Primissima Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen K3 di PT Primissima merupakan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja agar terjamin keselamatannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Sistem Manajemen; Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Abstract

Occupational Safety and Health (K3) was significant for various projects is the high risk of work accidents and the need to implement an OHS Management System to avoid work accidents in the workplace or production process. Production activities at PT Primiissima are also not spared from work accidents that occur every year, so efforts are needed to prevent and reduce work accidents through research on the use of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) properly and correctly by applicable regulations. The study using qualitative methods, and data collection was taken by using observation, interview, and documentation techniques at the research location, namely at PT Primiissima Sleman Regency. From the results of this study, it is a resume that the implementation of the K3 Management System at PT Primiissima is a policy carried out by the company as a form of protection for workers to ensure their safety by existing regulations.

Keywords: Policy Implementation; Occupational Safety; and Health Management System.

A. Latar Belakang

Pada dasarnya hal yang paling berperan penting untuk mencapai suatu tujuan adalah dengan memulai dari hal yang paling menunjang untuk tercapainya suatu tujuan tersebut, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini perlu dilakukan yang namanya pengelolaan atau pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang produktif. Adanya pengelolaan atau pengembangan yang baik maka dengan mudah sumber daya manusia dapat menghadapi dan menyelesaikan tuntutan tugas baik di masa sekarang atau masa yang akan datang.

Sumber daya manusia berperan penting bagi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, karena manusia merupakan bagian yang perlu diperhatikan secara khusus dan dikelola sebaik mungkin oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia diperlukan suatu manajemen yang mampu mengelola sumber daya secara sistematis, terencana dan efisien.

Menilai pentingnya tenaga kerja bagi suatu negara, terjadinya insiden kerusakan lingkungan akibat industrialisasi yang menyebabkan masih banyaknya kecelakaan

kerja, dunia internasional menetapkan mutu proses K3 yang kita kenal sebagai *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001. OHSAS juga mendukung reputasi perusahaan, tanggung jawab pengusaha terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan masyarakat secara umum. OHSAS 18001 memasukan struktur K3 ke dalam perusahaan atau bisnis yang di dalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang berkelanjutan guna tercapainya kondisi *zero accident*. Di Indonesia, sistem pengendali mutu K3 itu sendiri dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilaksanakan atas dasar PERMENAKER Nomor 05 Tahun 1996.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang sangat penting bagi proyek yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi, karena apabila tidak adanya tindakan untuk dilakukannya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat menimbulkan permasalahan terhadap beberapa aspek seperti kemanusiaan, ekonomi, lingkungan dan hukum. Pekerja mempunyai korelasi begitu erat dengan kecelakaan kerja, sedangkan kecelakaan kerja erat kaitannya dengan produktivitas pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3) sangat mempengaruhi pengembangan terhadap sumber daya manusia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja masih jauh dari yang diharapkan karena masih banyak terjadi kecelakaan kerja serta potensi bahaya kerja yang dapat membahayakan tenaga kerja. Terkait masalah perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan kerja, perusahaan menerapkan sistem manajemen yang dapat melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan menghindari kerugian yang besar terhadap perusahaannya. Salah satu sistem manajemen yang harus diterapkan adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

SMK3 dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat suatu perusahaan agar terhindar dari kecelakaan kerja, bahaya pengotoran bahan-bahan industrialisasi dan perlindungan bagi masyarakat luas dari bahayabahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk industri. Dari adanya risiko bahaya yang terkandung pada lingkungan kerja, kondisi keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja dapat terhambat sehingga akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas dalam suatu organisasi (Ramli, 2013).

Keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur

dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia (Ramli, 2013). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian terpenting dalam mengelola sebuah manajemen risiko oleh suatu perusahaan ataupun organisasi (Sungkono, 2015). Istilah dalam keselamatan mencakup 2 (dua) bagian, yaitu risiko keselamatan dan risiko kesehatan.

Dalam membentuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik, perusahaan harus mampu menanamkan dari internal perusahaan terlebih dahulu lalu memberikan penyuluhan dan pembinaan pada setiap karyawan atau 4 pekerja dalam pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Sungkono, 2015). Jika masih banyak kasus kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan kemungkinan menyebabkan banyak pekerja yang menderita, menurunnya realisasi produksi peningkatan absensi pada pekerja dan berdampak kerugian besar bagi perusahaan.

Pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan harus meningkatkan prosedur ketentuan, seperti menerapkan dan menjamin

komitmen kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), membuat perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan prosedur agar terarah, pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus didukung oleh sumber daya serta sarana dan prasarana untuk mendapatkan lingkungan kerja yang baik, dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja agar mampu menjamin efektifitas dan kesesuaian dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) memiliki banyak manfaat seperti, pihak manajemen mampu mengetahui kelemahan dari sistem operasional sebelum terjadinya gangguan operasional yang dapat menyebabkan kerugian, mengetahui gambaran jelas mengenai kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan, meningkatkan pemenuhan dan kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan (Awuy, T, Pratas, P. A. K dan Mangare, J.B, 2017).

Saat ini banyak sekali perusahaan yang masih mengalami kecelakaan di lingkungan kerja yang cukup tinggi, karena rendahnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Masalah

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia masih sering terabaikan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tahun 2021 mencatat bahwa ada 234.270 kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Dalam dunia usaha memang dibutuhkan tenaga kerja yang banyak, tak jarang ada banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS ketenagakerjaan dan juga tidak memberikan biaya atau tunjangan kepada tenaga kerja ketika terjadi kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat bahkan kematian pekerja itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pengawasan yang lemah oleh pemerintah, perhatian instansi yang rendah karena menganggap K3 sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk para pekerja serta tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran K3. Untuk hal tersebut, bila tidak diperbaiki dikhawatirkan akan membuat instansi semakin mengabaikan pentingnya K3 yang seharusnya menjadi jaminan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja.

Suatu kecelakaan kerja terjadi apabila terdapat berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat kerja atau proses

produksi. Pada penerapan atau implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang merupakan kewajiban setiap perusahaan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Penerapan 6 tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi di tempat kerja serta meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT Primissima juga tak luput dari adanya kecelakaan kerja yang terjadi. PT Primissima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang memiliki jumlah pekerja lebih dari 500 jiwa, sehingga tingkat risiko kecelakaan kerja cukup tinggi karena dalam proses produksinya menggunakan mesin dan alat berat guna mengolah bahan-bahan produksi. PT Primissima telah melaksanakan upaya dalam penerapan K3 di perusahaan. Kegiatan utama K3 yang disediakan oleh P2K3 di perusahaan adalah soft skill, sosialisasi K3, pemenuhan peraturan pemerintah dan penyediaan APD.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan HRD yang juga memiliki jabatan fungsional sebagai ketua dari

Panitia Pembina K3 di PT Primissima Yogyakarta bahwa sering terjadi kecelakaan kerja. Pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 24 kasus, kemudian pada tahun 2021 kecelakaan kerja menurun menjadi 18 kasus, sedangkan yang terbaru pada tahun 2022 jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 12 kasus.

Melihat dari fakta adanya kecelakaan kerja setiap tahunnya di PT Primissima Yogyakarta, maka diperlukan upaya pencegahan dan meminimalisir kecelakaan kerja melalui penelitian pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara baik dan benar 7 sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penerapan SMK3 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi tenaga kerja agar dapat bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan dapat mendukung peningkatan kinerja dan produktivitas kerja bagi para pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Primissima Yogyakarta”.

B. Metode Penelitian

B.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam permasalahan di atas adalah metode penelitian empiris dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Melalui metode ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan guna melakukan penelitian dan mencari data yang dibutuhkan, sehingga bertujuan untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 di PT Primissima Yogyakarta sudah berjalan dengan semestinya atau tidak.

B.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dalam pengumpulan data berasal dari indikator yang akan diteliti, mencakup pada penerapan dari Sistem Manajemen K3 dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

B.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan terkait jenis sumber data pada penelitian:

- a. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak terkait yaitu

pihak internal dan eksternal di PT. Primissima Yogyakarta yang menjadi elemen penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3 dan penemuan dari lapangan yang berupa catatan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya berasal dari arsip dokumen atau dari karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari Undang-Undang, PERMENAKER maupun Peraturan Pemerintah yang ada keterkaitannya dengan implementasi kebijakan Sistem Manajemen K3 di PT. Primissima Yogyakarta.

B.4 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah PT. Primissima Yogyakarta dan penelitian ini akan dilaksanakan dengan kurun waktu kurang lebih 2 bulan, mulai dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023.

B.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan internal (pejabat) dan informan eksternal (pekerja) terkait seperti data di bawah ini:

Tabel Informan Penelitian

No.	Jabatan Informan	Jumlah
1.	Bag. Penyimpanan	1
2.	HRD/Ketua P2K3	1
3.	Bag. Ketenagakerjaan	1
5.	Bag. Produksi	2
6.	Bag. <i>Maintenance Weaving</i>	1
7.	Pekerja	3

Penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel karena orang tersebut dianggap paling tahu tentang objek yang diteliti.

B.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akurat, terpercaya dan relevan maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teknik observasi yaitu merupakan teknik melihat dan meneliti langsung mengenai keadaan, penerapan, cara kerja serta hal-hal yang dipandang perlu dan ada hubungannya dengan

permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi manajemen K3.

- b. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan cara bertanya kepada informan terkait objek dan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data sekunder berupa buku, surat, dokumentasi, gambar dan sebagainya.

B.7 Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu memilah-milah data, mengelompokkan data, memberi gambaran, penjelasan dan menganalisis data dengan menggunakan teori yang ada untuk memecahkan masalah yang kemudian akan ditarik kesimpulannya. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 34 secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi yang baru (Miles dan Huberman, 1984).

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen K3.

Penerapan Sistem Manajemen K3 itu dilakukan berdasarkan dengan adanya kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen K3 yang merupakan pedoman bagi perusahaan dalam menerapkannya, perusahaan juga mengembangkan pedoman penerapan Manajemen K3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerapan dari kebijakan Sistem Manajemen K3 yang merupakan cara tepat melaksanakan sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam penerapannya, kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Penetapan Kebijakan

PT Primissima merupakan perusahaan tekstil yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 500 jiwa dan memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena dalam proses produksinya menggunakan mesin dan alat berat guna mengolah bahan produksi. Hal ini yang menjadikan PT Primissima menetapkan kebijakan K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh PT Primissima bahwa penetapan kebijakan K3 di PT Primissima itu terkait dengan kebijakan tertulisnya hanya ada SK Direksi (Surat Keputusan direksi PT Primissima), bentuk dari SK Direksinya itu hanya SK P2K3 dan adanya SK tersebut bisa dilihat dari adanya DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan) PT Primissima yang dilandasi oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dari pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendokumentasian kebijakan tertulis belum terpenuhi dan memadai di PT Primissima, seharusnya perusahaan itu memiliki kebijakan tertulis terkait K3 yang mencakup visi, tujuan sasaran dan komitmen dalam kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan, kebijakan tertulis dalam penetapan K3 itu hanya ada dalam bentuk SK P2K3.

b. Perencanaan K3

Pada perencanaan K3 dengan adanya identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap kegiatan yang ditimbulkan, antara lain seperti penyakit akibat kerja pada telinga yang bersumber dari tingkat kebisingan yang tinggi. Adanya

pengendalian bahaya yang dirancang oleh perusahaan untuk mencegah bahaya dan efek yang terjadi pada pekerja, ini dilakukan dengan maksimal agar dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya akibat kerja.

Seperti yang dikatakan oleh HRD PT Primissima bahwa dilihat dari kondisi perusahaan dengan banyaknya mesin pembuat kain dan sudah pasti akan ada bahaya yang ditimbulkan seperti kebakaran karena ada gesekan yang terjadi pada kapas lembut terus terkena percikan itu mudah sekali terbakar jadi awal kebakaran terjadi karena motor konslet dan memercikan api. Kemudian, perusahaan itu punya aturan-aturan K3 dalam bentuk PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan Pusako juga ada. Perusahaan itu punya tujuan yang dilandasi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya untuk keselamatan para pekerja, dari lampunsite perusahaan harus menciptakan tempat kerja yang aman bagi para pekerja.

Hal senada tersebut juga disampaikan oleh salah satu narasumber bahwa perencanaan K3 itu tujuannya agar zero accident atau tidak terjadi kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja atau kebakaran yang ujung-ujungnya safety untuk tenaga kerja dan keselamatan tenaga kerja itu tujuan

akhir dari K3 tentunya agar mereka sehat dan bisa bekerja dengan aman. Tidak hanya untuk pekerja tetapi juga berlaku untuk tamu yang masuk pabrik seperti orang magang ataupun PKL itu juga harus ada perlindungan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, perencanaan K3 pada PT Primissima dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan K3 dan mencapai tujuan maupun sasaran dari ditetapkannya kebijakan K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu melindungi dan menjamin keselamatan bagi pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja.

c. Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 didukung oleh adanya sumber daya manusia yang ahli di bidang K3, seperti SDM yang memiliki sertifikasi dan kewenangan di bidang K3 dengan adanya organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3. PT Primissima memiliki organisasi yang bertanggung jawab di bidang K3 tersebut yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Dalam pelaksanaannya, P2K3 bertugas sebagai organisasi yang bertanggung jawab di bidang K3 karena untuk melaksanakan

rencana K3 tersebut mereka memiliki prosedur dan intruksi kerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa bentuknya di tuangkan di struktur P2K3 yang sudah memiliki sertifikasi ahli K3, itu menyangkut tugas dan jabatan pekerjaan masing-masing dan yang diprioritaskan di dalam P2K3 itu keamanannya. Khususnya terkait dengan kebakaran yang memang dominan karena pabrik ini 24 jam beroperasi dan harus ada yang jaga, jadi *security* atau satpam wajib untuk tahu terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan keamanan. Jadi manajemen sudah turun dan sudah sesuai, untuk pelaksanaan K3 itu harus ada keterlibatan antara pengusaha dan pekerja karena dari perusahaan sudah menetapkan K3 dan harus dilaksanakan oleh setiap pekerja. Kalau untuk Prosedur dan petunjuk mengenai K3 itu ada dalam bentuk SOP PBK (Koordinasi Pelaksanaan Pemadam Kebakaran), spanduk K3 dan perusahaan juga menyediakan poster-poster terkait keselamatan kerja di dalam ruang produksi. Kalau untuk pelaporan setiap terjadi kecelakaan kerja kami juga ada data lengkap setiap tahun terkait kecelakaan kerja di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Primisima sudah menjalankan prosedur terkait dengan tugas dari adanya penanggung jawab di bidang K3 yaitu P2K3 yang memprioritaskan keamanan bagi para pekerja dan memiliki petunjuk terkait K3 seperti poster-poster yang ada pada ruangan produksi di perusahaan dan dalam pelaksanaannya perusahaan juga membuat prosedur laporan terkait dengan adanya kecelakaan kerja yang terjadi setiap bulan dan tahunnya.

d. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan dan Evaluasi kinerja K3 dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dijalankan agar dapat mengetahui kondisi dari pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan rencana kebijakan K3, hal ini dilakukan untuk adanya tindakan perbaikan jika ada penyimpangan yang terjadi.

Dalam penerapan kebijakan tersebut adapun pihak terkait yang ditunjuk untuk memantau dan mengevaluasi jalannya kinerja K3, seperti yang dikatakan oleh Bapak Roman bahwa yang memantau kinerja K3 itu perusahaan, gunanya ada pemantauan itu agar perusahaan bisa cepat mengetahui jika ditemukan kesalahan atau

penghambat lainnya terkait K3 ataupun sarana dan prasarananya. Misalnya seperti pada saat pemantauan didapati lampu mati di ruangan tertentu dan di tiga titik pada belakang perusahaan jadi dari pihak manajemen teknik terkait akan menunjuk pihak ketiga untuk memperbaiki lampu sebagai penerangan yang sangat dibutuhkan di perusahaan, bisa dilihat sendiri kalau ruangan perusahaan tidak selalu memiliki jendela yang besar sehingga percahayaan yang masuk hanya sedikit.

Hal ini diperkuat juga dengan yang disampaikan oleh salah satu tim P2K3 yang melakukan patroli di perusahaan dan yang memantau itu seksi penanggung jawab K3 terkait resiko kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Di perusahaan itu di bawah mesin ada lorong yang besar diameternya sekitar dua meter dan memanjang itu untuk menjaga RH agar kualitas kanji kainnya terjaga karena lorong itu lembab dan gelap jadi kadang ada ularnya itu yang mengatasi ada dari maintenance dan penyelesaiannya dengan cara membasmi ular tersebut. Kemudian untuk rapat evaluasi bulanan di internal departemen maupun setiap tahunnya kalau ada penyimpangan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan

evaluasi kinerja K3 sudah dilakukan oleh perusahaan, dari perusahaan itu sendiri sudah ada organisasi yang ditunjuk yaitu P2K3 kemudian dari P2K3 itu ada pihak ketiga/maintenance terkait dalam bidangnya yang terjun langsung guna mengatasi adanya penerangan yang padam maupun membasmi ular di lorong dan runtuk evaluasi dari perusahaan juga sudah ada setiap tahunnya.

e. Peninjauan dan Peningkatan Sistem Manajemen K3

Dalam peninjauan dan peningkatan SMK3 yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan dari SMK3 itu sendiri yaitu guna meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur dan terstruktur, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja serta meningkatkan tempat kerja yang aman untuk mendorong produktivitas pekerja.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sigit selaku HRD PT Primissima bahwa peninjauan itu bentuknya *advice* atau saran untuk koordinasi terkait seperti penanggung jawab dan pengawas, kemudian ada peninjauan dalam bentuk perbaikan terkait sarana maupun prasarana yang akan ditindak lanjuti oleh departemen terkait.

Kalau untuk peningkatan dari implementasi K3 itu sendiri ya meningkatkan kinerja para pelaksana K3, ada juga untuk pengurus atau penanggung jawab K3 yaitu P2K3 yang kami ikutkan seminar atau workshop terkait K3, tetapi untuk anggota P2K3 itu yang memiliki sertifikasi Ahli K3 Umum hanya saya dan ada satu orang lagi tapi sudah MPPT sedangkan anggota kepengurusan lainnya yang ada di dalam P2K3 belum memiliki sertifikasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peninjauan tersebut sudah baik karena perusahaan melalui departemen terkait melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari penerapan kebijakan Sistem Manajemen K3 seperti perbaikan dari sarana dan prasarananya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, sedangkan pada peningkatan kinerja dari implementasi kebijakan terkait K3 sudah dilaksanakan tapi belum mencukupi seperti yang dijelaskan di atas kalau hanya ketua P2K3 yang sudah memiliki sertifikasi Ahli K3 Umum, sedangkan anggota lainnya tidak memiliki sertifikasi tersebut. Jadi anggota P2K3 itu belum kompeten dilihat dari kemampuan dan pengetahuannya karena tidak memiliki sertifikasi tersebut.

C.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Manajemen K3

Implementasi kebijakan Sistem Manajemen K3 tidak terlepas dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ke empat faktor tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan dari kebijakan Sistem Manajemen K3, karena ini dibutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak para pelaksana kebijakan tersebut.

a. Komunikasi

Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam segala hal termasuk dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang ada ini berpengaruh terhadap berhasil tercapainya tujuan dari kebijakan, sedangkan kurangnya komunikasi atau yang biasa disebut miskomunikasi akan menghambat tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan tersebut.

Seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu narasumber bahwa informasi disampaikan dari atasan ke bawahan dan istilahnya ada penyuluhan-penyuluhan, selama ini tidak ada hambatan dan sudah jelas dengan apa yang disampaikan kalau ada informasi-informasi terkait. Untuk informasi yang diberikan mengenai K3 itu setahu saya setahun sekali, tapi juga ada

yang mungkin satu bulan sekali di bagian pekerja tertentu.

Diperkuat dengan pernyataan dari salah satu narasumber selaku pekerja di bagian *grey finishing* bahwa komunikasinya sudah bagus ya melalui intruksi, melalui MI maupun secara langsung. Tidak ada hambatan untuk ini, perusahaan juga konsisten menyampaikan informasi itu setahun sekali kalau ada penyimpangan.

Sedangkan salah satu informan selaku pekerja di bagian Gudang Spare menyampaikan pernyataan bahwa Terkait K3 di bidang bagian saya kerja sudah berjalan baik, komunikasi juga tidak ada kendala. Untuk sosialisasi itu biasanya diadakan kurang lebih setahun sekali dengan adanya pelatihan Damkar Sleman, kalau tentang penyuluhan atau semacam sosialisasi dari P2K3 setahu saya belum pernah.

Dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan perusahaan kepada pekerja berjalan 49 dengan baik dan tidak ada hambatan. Tetapi pada pemaparan yang disampaikan oleh salah satu tim P2K3 terkait dengan tidak adanya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh P2K3, hal ini bertentangan karena sebelumnya

beliau menyampaikan bahwa tidak adanya kendala pada komunikasi yang ada. Tentunya pemaparan dari tim P2K3 tidak sinkron dengan pemaparan yang disampaikan oleh para informan, bisa dikatakan bahwa komunikasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada informan belum tersampaikan dengan baik.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam penelitian ini meliputi kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana perusahaan serta dana yang digunakan oleh perusahaan. Pada penerapan kebijakan Sistem Manajemen K3 ini tidak selalu berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan dan kendala yang dihadapi. Walaupun perusahaan sudah menerapkan kebijakan dengan sebaik mungkin masih ada saja masalah yang terjadi.

Seperti yang disampaikan oleh informan terkait yaitu salah satu narasumber bahwa kuantitas sudah mencukupi karena pekerja di memadainya ini jumlahnya lebih dari 500 jiwa dan jam kerjanya dibagi antara *shift* pagi, *shift* siang dan *shift* malam dengan waktu kerja 8 jam/harinya, tapi kalau untuk kualitas dari para pekerjaanya dalam pelaksanaan K3 bisa dibilang kurang efektif karena

kesadarannya masih rendah sehingga itu menjadi penyebab dari terjadinya kecelakaan kerja seperti kelalaian dari individu itu sendiri, bisa dibilang *human error*.

Diperkuat juga dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu narasumber bahwa Kecelakaan kerja itu yang dominan justru terjadi di luar perusahaan, keselamatan pekerja itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai dari berangkat sampai pulang kerja. Ada pekerja yang rumahnya di Godean bekerja di Primisima dengan jarak tempuh perjalanan 30 menit dan dia masuk *shift* pagi, *shift* pagi itu mulai dari jam 6 sampai jam 2 siang. Untuk diketahui bahwa karyawan itu kalau terlambat potong gaji, potong gaji sehari makanya mereka akan berusaha agar tidak terlambat. Dari rumah sudah mepet dan terburu-buru karena kurang manajemen waktu yang akhirnya melanggar lalu lintas. Dampaknya ya terjadilah kecelakaan kerja, kalau dari Godean harus mutar ke sana satu kilo karena terburu-buru akhirnya memotong jalan dan terjadilah kecelakaan.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan mengenai kuantitas dari jumlah dan lama bekerja sudah efektif tetapi pada kualitas SDM itu sendiri masih

tergolong rendah karena tidak *safety* terhadap diri sendiri. Perusahaan sudah memberlakukan sanksi potong gaji bagi pekerja karena terlambat masuk kerja, dari sisi ini bisa dideskripsikan bahwa pekerja kurang mampu manajemen waktu ketika pergi bekerja. Kemudian terkait sarananya masih kurang memadai karena PT Primisima itu rawan terjadi kebakaran tetapi perusahaan belum memiliki alat seperti *Fire Alarm System* yang membutuhkan anggaran cukup besar untuk pemasangannya.

Tidak kalah penting juga dalam hal pendanaan serta sarana dan prasarana, PT Primisima memiliki komitmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Jalannya suatu kebijakan ini mendapat dukungan dari adanya pendanaan yang baik dan mencukupi, pendanaan ini harus mampu menunjang segala sesuatu yang dianggap sebagai fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara, tiga informan terkait menyatakan bahwa benar adanya anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai dan memfasilitasi pekerja. Anggaran tersebut terhitung cukup besar dalam setahunnya, pekerja difasilitasi tempat kerja dengan adanya berbagai ruangan produksi karena bisa dikatakan PT

Primissima itu memiliki tiga bangunan yaitu perusahaan satu, perusahaan dua dan perusahaan tiga yang letaknya berdekatan.

Diperkuat juga dengan yang disampaikan oleh Ketua P2K3 bahwa Anggaran yang dikeluarkan rata-rata ya sekitar 40 sampai 80 juta dalam setahun, yang paling mahal itu digunakan untuk pengadaan sarana yang di butuhkan oleh perusahaan seperti *maintenance* APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan perusahaan juga tidak memiliki sistem proteksi keamanan tersistem seperti alat *Fire Alarm System*.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Primissima sudah memiliki anggaran yang cukup besar untuk memfasilitasi pekerja dalam menyediakan sarana dan prasarana sehingga pekerja bisa bekerja dengan aman dan nyaman, karena ini menyangkut dengan 52 keselamatan para pekerja jadi perusahaan bertanggung jawab atas segala fasilitas yang diperlukan oleh para pekerja. Tetapi, anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut masih kurang mencukupi karena belum adanya sarana seperti alarm kebakaran yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

c. Disposisi

Dalam hal ini, disposisi yang dimaksud adalah sikap dari implementor kebijakan K3 di PT Primissima yaitu perusahaan sebagai pemberi dukungan terhadap penyediaan sarana maupun prasarana dan para pekerja aktif yang merupakan *stakeholder* di dalamnya. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua P2K3 di PT Primissima beliau mengatakan bahwa Ada dukungan sosialisasi yang bentuknya pembinaan dan adanya evaluasi terhadap masing-masing departemen, sebenarnya sosialisai itu dilakukan sejak SK dua berlaku. Dukungan lainnya juga seperti perusahaan memfasilitasi prasarana untuk perkerja sehingga dapat bekerja di dalam ruangan yang nyaman.

Dari segi dukungan perusahaan juga harus konsisten dalam menyampaikan informasi dan pekerja juga konsisten dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber selaku seksi keamanan atau *security* di PT Primissima bahwa informasi itu ditunjukkan ke komandan dulu baru ke anggota. Dari P2K3 itu sendiri ada sosialisai dan evaluasi.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen dan

konsistennya perusahaan sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan Sistem Manajemen K3 serta dukungan dari *stakeholder* pun baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Perusahaan juga melakukan pembinaan, sosialisasi dan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari mengimplementasikan kebijakan Sistem Manajemen K3 itu sendiri.

e. Struktur Birokrasi

PT. Primissima yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, secara legalitas dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen K3 memiliki organisasi yang mengatur dan memandu secara teknis. Seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Direksi PT. Primissima (Persero) Nomor: 537/SK/2018 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Primissima (Persero).

D. Penutup

D.1 Kesimpulan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan kebijakan dengan upaya mencegah dan mengurangi penyebab maupun risiko kemungkinan terjadi kecelakaan kerja serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang

aman dan nyaman untuk para pekerja. Dalam hal ini, adanya Sistem Manajemen K3 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan K3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan Sistem Manajemen K3 di PT Primissima belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 karena dari lima indikator terdapat dua indikator yang tidak sesuai dengan persyaratan di dalam peraturan tersebut yaitu pada penetapan kebijakan K3 yang tidak memiliki kebijakan tertulis terkait penetapan K3 dan tidak semua anggota P2K3 memiliki serifikasi Ahli K3 Umum.
- b. Faktor-faktor implementasi kebijakan Sistem Manajemen K3 yaitu komunikasi yang tidak sinkron, sumber daya yang kurang memadai, adanya dukungan yang memadai serta adanya kejelasan tugas dan wewenang dari struktur organisasi P2K3.

E.2 Saran

Implementasi kebijakan Sistem Manajemen K3 dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan K3, berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya kebijakan tertulis terkait dengan penetapan segala bentuk kebijakan K3.
- b. Perlu dilakukan peningkatan komunikasi yang baik dan jelas kepada seluruh pekerja.
- c. Perlu adanya anggaran yang memadai untuk sarana yang dibutuhkan.
- d. Perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten seperti anggota P2K3 yang harus memiliki sertifikasi Ahli K3 Umum.
- e. Perlu adanya kesadaran dari para pekerja guna meningkatkan efektifitas jalannya peraturan terkait K3 di perusahaan.

Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu". Jurnal Professional FIS UNIVED. Vol. 6, No. 1, Juni 2019.

Arif, Sukuryadi dan Fatimaturrahmi. 2017. "Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Smp Negeri 1 Praya Barat". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 1, No. 2, November 2017 (111).

Kukun, S. L. 2015. "Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada PT. Pertamina (Persero) Terminal Bbm Kijang." NASKAH PUBLIKASI, 9.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

DR. Taufiqurokhman, S. M. (2014). *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi kebijakan Publik (kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press - Gorontalo.

Jurnal

Agustian, Ilham, Harius Eko Saputra dan Antonio Imanda. 2019. "Pengaruh

Nurul Sapta Widodo, D. K. (2020). *Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Pelindo Marine Service*. Jurnal Aplikasi Pelayanan dan Kepelabuhan, 114-119.

Susan, Eri. 2019. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 9, No. 2, Agustus 2019.

Syafriman Rivai, R. N. (2021). *Pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.

Tudermi Maksimilyan Fioh, A. U. (2021). *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) Rayon Rote Ndao*. Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Vol. 10, No. 1, Januari-April 2021

Yulia, Elih. 2022. "Implementasi Kebijakan Pendidikan". Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan. Vol. 30, No. 2, Tahun 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1987 tentang Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Website

Baihaqi, B. (2022, November). *Kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia Memprihatinkan*. Diambil kembali dari <https://www.neraca.co.id/article/92674/kondisi-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-indonesia-memprihatinkan>

Banten, D. P. (2022, November). *Pengertian Dan Pentingnya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Diambil kembali dari <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/288>

Mahdi, M. I. (2022, November). *Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Alami Tren Meningkat*. Diambil kembali dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-alami-tren-meningkat>

Primissima, P. (2022, November). *PT.PRIMISSIONA (Persero)*. Diambil kembali dari <https://primissima.co.id/>

Purwanto, H. (2022, November). *Kondisi K3 di Indonesia Masih Memprihatinkan*. Diambil kembali dari <https://www.antaraneews.com/berita/84266/kondisi-k3-di-indonesia-masih-memprihatinkan>

Sertifikasi, M. M. (2022, November 7). *Sejarah Lahirnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://mutiaramutusertifikasi.com/sejarah-lahirnya-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-di-indonesia/>